



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Sabtu

Tanggal: 28 Agustus 2021

Halaman: 2

**PENUNDAAN RAPERDA BPRS PERSOALAN TEKNIS**

## Kepala Daerah Jamin Komitmen Bangun Ekonomi Syariah

**YOGYA (KR)** - Kepala daerah Kota Yogya menjamin komitmennya dalam membangun ekonomi syariah melalui sektor keuangan. Penundaan rancangan peraturan daerah (raperda) Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) untuk dibahas tahun ini pun dinilai karena persoalan teknis.

Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, mengungkapkan kondisi saat ini masih belum memungkinkan untuk mendirikan BPRS. "Kalau sekarang kita bahas akan kesulitan menentukan kapan pembentukan dimulai. Misal diputuskan tahun 2023, kalau kondisi keuangan belum mampu justru kita tidak bisa menjalankan amanat perda. Jadi hanya soal teknis karena kondisi darurat," katanya, Jumat (27/8).

Di samping itu, penundaan tersebut bukan berarti Pemkot tidak akan mengajukan raperda BPRS kembali. Pengajuan akan tetap dilakukan jika kondisi sudah memungkinkan. Terutama menyangkut kondisi perekonomian dan kemampuan Pemkot. Kendati dalam RPJMD 2017-2022 sudah disebutkan terkait kepemilikan BPRS namun bukan berarti haluan visi misi kepala daerah tersebut perlu direvisi.

Menurut Heroe, makna kepemilikan bisa diartikan cukup luas. Salah satunya jika harus dibentuk melalui perseroan terbatas (PT) dengan melibatkan pihak lain. Sehingga hal itu bisa dipersepsikan dengan menanam saham di perbankan syariah yang sudah ada, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. "Makanya ada opsi kita lakukan penyertaan modal di bank syariah yang sudah ada untuk penguatan. Dengan membeli saham berarti juga ada kepemilikan. Tapi komitmen untuk menumbuhkan bank syariah tetap kita jalankan," imbuhnya.

Oleh karena itu, Heroe menjamin janji kepala daerah terkait ekonomi syariah tidak akan terabaikan. Hanya, untuk sementara lebih bersifat pembelian saham di bank syariah yang sudah berdiri. Sedangkan untuk membentuk bank syariah secara mandiri masih terus diupayakan sembari mempertimbangkan kemampuan daerah. Apalagi bank syariah sudah tidak bisa lagi menjadi satu dengan bank konvensional sehingga harus berdiri sendiri.

Sebelumnya, rencana pembahasan raperda BPRS menjadi dinamika di kalangan dewan. Sejumlah fraksi memiliki pandangan berbeda sehingga rencana pembentukan panitia khusus (pansus) selalu kandas. Terakhir, pada 19 Agustus 2021 lalu walikota mengajukan surat ke dewan terkait penundaan raperda BPRS yang sudah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2021.

**Tindak Lanjut**  
Untuk Ditanggapi  
Untuk Diketahui  
Untuk Pers

| Instansi                          | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|-----------------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Bagian Perekonomian Pengemb. P | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 02 Agustus 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005